

BAB II

DINAMIKA POLITIK FILIPINA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Sejarah Politik di Filipina sejak masa penjajahan sampai masa kemerdekaan, dijelaskan pula mengenai Sistem Politik Filipina, Sistem Pemilu di Filipina, Sistem Pemerintahan, dan banyaknya penolakan terhadap Duterte sebagai kandidat calon presiden sampai akhirnya berhasil memenangkan pemilu presiden Filipina 2016.

Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Lingkar Pasifik Barat, negara ini terdiri dari 7.107 pulau, pulau yang membentang sekitar 1.850 kilometer di sepanjang tepi barat Samudra Pasifik dengan total wilayah 301.780 km².¹ Tiga pulau utamanya adalah Luzon, Visayan, dan Mindanao. Sebagian besar pulau-pulau Filipina kecil dan tak berpenghuni. 95% luasnya terbentuk oleh 11 pulau. Tiga diantaranya adalah Luzon, Visayan dan Mindanao. Pada tanggal 21 Januari 2017 populasi di Filipina sebanyak 104.498.600 jiwa.² Filipina memiliki masyarakat dengan suku dan agama yang beragam, agama katolik yang paling mendominasi di Filipina sebanyak 82,9% pada sensus tahun 2000. Hal ini membuat berbagai macam kepentingan diantara para penguasa pemerintahan.

¹ The Philippines, <http://www.gov.ph/about/philippines/> diakses pada 3 Februari 2017

² Population in philippines, <http://rpo3.popcom.gov.ph/> diakses pada 9 Februari 2017

Gambar 2. 1. Map of Philippines



Sumber : “Map of Philippines” dalam <http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/philippines/>

Pemilihan Umum (pemilu) menjadi salah satu bagian penting dalam pemerintahan yang demokrasi sejak abad ke 17.³ Pemilu adalah mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat yang diharapkan menjadi representasi suara rakyat di dalam pemerintahan, sehingga politisi bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan opini masyarakat.

Di Filipina sistem pluralitas sudah ada sejak konstitusi 1935, konstitusi 1973, konstitusi 1987. Di bawah konstitusi 1987, semua pejabat fakultatif , Presiden, wakil presiden, senator, anggota DPR, kepala pemerintahan daerah dan anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui ‘*first-past-the-post*’ sistem.

³ *Election (political science)*, Encyclopaedia Britanica Online, <https://www.britannica.com/topic/election-political-science> Retrieved 17 August 2011

A. Sejarah Politik Filipina

Filipina pernah dijajah oleh tiga negara sejak abad ke-16 yaitu oleh Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Spanyol adalah negara yang paling lama menjajah yaitu sejak tahun 1565 sampai 1898, setelah itu Amerika Serikat datang dan menjajah selama 48 tahun, kemudian Jepang menjajah selama 3,5 tahun bersamaan dengan Perang Dunia kedua. Ketiga negara tersebut membawa banyak pengaruh pada Filipina, salah satunya adalah pengaruh dalam politik.

1. Masa Penjajahan Spanyol

Spanyol mulai menjajah Filipina secara resmi dimulai ketika di Cebu terjadi penandatanganan *Filipino – Spanish Treaty* pada tanggal 4 Juni 1565. Kedatangan Spanyol ke Filipina ditandai dengan kedatangan Miguel Lopes de Legaspi. Kedatangan Legaspi ke Filipina atas perintah dari Raja Philips II untuk melakukan ekspedisi ke Timur (Maluku dan Filipina). Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, Spanyol mulai menjajah Filipina sejak 1565-1898 selama \pm 300 tahun. Penjajahan oleh Spanyol di Filipina membuat banyaknya pemberontakan dan gerakan untuk menentang bangsa Spanyol. Spanyol dianggap telah merampas kemerdekaan bangsa Filipina, Spanyol melakukan pemerasan terhadap rakyat juga melakukan penyeragaman bahasa yaitu menggunakan bahasa Spanyol untuk memudahkan komunikasi antara kedua negara, karena bangsa Spanyol ingin menyebarkan agama Katolik, sehingga penggunaan bahasa dianggap sangat penting. Pengajaran bahasa Spanyol dimulai dari sekolah-sekolah.

Perampasan hal-hak rakyat memunculkan sosok yang ingin mempersatukan bangsa Filipina yaitu Jose Rizal. Pada tahun 1892 Jose Rizal membentuk Liga Filipina (*Philippine League*)⁴ untuk mempersatukan bangsa Filipina melawan bangsa Spanyol. Pasca pembentukan Liga Filipina, rakyat Filipina kembali bangkit untuk melawan penjajah. Semangat rakyat Filipina bangkit melalui sajak-sajak dan semangat yang dikobarkan oleh Jose Rizal. Hal ini dianggap sebagai ancaman oleh bangsa Spanyol karena khawatir akan meyulut perlawanan rakyat Filipina. Perjuangan yang dilakukan Jose Rizal membuatnya dikenal sebagai seorang *reformis*.⁵

Pada tahun 1896 Jose Rizal meninggal dunia yang kemudian menginspirasi munculnya gerakan revolusi kemerdekaan Filipina yang lebih luas. Revolusi inilah yang menjadi puncak perjuangan kemerdekaan Filipina yang ditandai dengan rapat umum rakyat Filipina dibawah kepemimpinan Andres Bonifacio. Tetapi hal ini tidak berhasil. Sampai dengan kepemimpinan berganti dibawah Emilio Aguinaldo yang kemudian memproklamkan kemerdekaan bangsa Filipina dari penjajahan Spanyol di kota Kawit Cavite⁶ dan membentuk *The First Philippine Republik of Malolos*. Tetapi kemerdekaan Filipina tidak diakui oleh Amerika Serikat yang kemudian selanjutnya mengambil alih kekuasaan dan melakukan penjajahan di Filipina menggantikan Spanyol pada tahun 1898.

⁴ Sudharmono, *Sejarah Asia Tenggara Modern, dari Penjajahan ke Kemerdekaan*, PAU – Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 2002, hlm. 110-111.

⁵ B. N Marbun, *Op.Cit .*, hlm. 549.

⁶ D.G.E. Hlml, *Sejarah Asia Tenggara*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur , 1987 , hlm. 932.

Dalam bidang Politik Spanyol mengajarkan sistem sentralisasi politik dan administrasi pemerintahan. Di mana Gubernur Jenderal menduduki puncak pemerintahan, orang-orang yang mengisi pemerintahan berasal dari bangsa Spanyol. Sedangkan pemerintahan di tingkat desa diisi oleh masyarakat Filipina.

2. Masa Penjajahan Amerika Serikat dan Persemakmuran Filipina

Pada tahun 1898 Amerika Serikat mulai menjajah Filipina setelah Spanyol kalah perang dari Amerika dan menyerahkan kekuasaan atas Filipina kepada Amerika. Harapan kemerdekaan rakyat Filipina kandas pasca di proklamirkannya kemerdekaan Filipina pada Juni 1898. Kemerdekaan rakyat Filipina⁷ tidak diakui oleh Amerika, hal ini memunculkan perlawanan dari rakyat Filipina atas penjajahan Amerika Serikat. Rakyat Filipina mulai melemahkan perlawanan pasca ditangkapnya Jenderal Aguinaldo oleh pihak Amerika. Tetapi perjuangan rakyat Filipina untuk merdeka tidak menjadi surut.

Amerika menjajah Filipina dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Spanyol. Penjajahan yang dilakukan oleh Amerika lebih kepada pembentukan Filipina sebagai negara jajahannya untuk menjadi pemerintahan seperti yang diinginkan Amerika. Amerika menjadikan Filipina sebagai model negara dengan sistem kekuasaan liberal seperti Amerika di wilayah Asia. Untuk mewujudkan harapan tersebut Amerika harus mendidik, memperadabkan dan melatih orang Filipina untuk membentuk pemerintahan mandiri.⁸ Melalui Komisi Filipina tahun 1900 dibawah pimpinan William Taft Amerika. Taft mendorong

⁷ *Ibid.*, hlm. 933.

⁸ *Ibid.*, hlm. 935.

kebijakan Filipina untuk orang Filipina dan melakukan penempatan orang Filipina dalam struktur pemerintahan.

Pada tahun 1913 Amerika menyatakan akan memberikan kemerdekaan pada Filipina dengan membuat *Jones Law Act* pada tahun 1916 yang isinya terkait pembentukan struktur pemerintahan yang kuat dan ideal bagi Filipina. Selain itu di dalam *Jones Law Act* juga dinyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberikan kemerdekaan untuk Filipina dan mengakuinya secepat mungkin hingga pemerintahan yang stabil di Filipina bisa terbentuk.

3. Masa Penjajahan Jepang

Pendudukan Jepang di Filipina dimulai pada tanggal 2 Januari 1942. Komandan tentara Jepang Masharu Homma menyatakan bahwa pendudukan Amerika Serikat di Filipina telah berakhir. Jepang melakukan invasi di Filipina dengan membawa kabar bahwa Filipina akan terbebas dari Amerika yang telah menindas rakyat Filipina. Selama pendudukan Jepang di Filipina masyarakat tidak bersimpati kepada Jepang karena Jepang dianggap hanya mencari keuntungan untuk negaranya sendiri, dan Jepang tidak menunjukkan untuk memberi kebebasan bagi Filipina.

Jepang mengetahui bahwa rakyat tidak bersimpati sehingga mulai mengambil hati rakyat dengan berupaya memberikan kemerdekaan bagi Filipina. Pada Januari 1943 Premier Tojo Hideki menyatakan bahwa Jepang akan menjamin kemerdekaan Filipina selama rakyat Filipina mau bekerja sama dan

mau mendukung program-program Jepang dalam membentuk kemakmuran Asia Timur Raya.

Usaha Jepang untuk mendapat simpati rakyat Filipina dengan pendirian Republik Filipina pada 14 Oktober 1943 dengan Jose P. Laurel sebagai Presiden tidak berhasil. Kemudian tanggal 5 Juli 1945, Mac Arthur mengumumkan bahwa Filipina telah bebas.

4. Republik Filipina

Kemerdekaan Filipina terjadi pada tanggal 4 Juli 1946 setelah Jepang menyerahkan Filipina kembali ke Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Filipina menandatangani perjanjian pada tahun 1947 mengenai hubungan kedua pemerintahan yaitu pakta bantuan militer di mana Filipina memberikan izin penempatan basis militer Angkatan Laut dan pangkalan udara Amerika di Filipina selama 99 tahun. Filipina tidak memiliki pilihan lain, dan kemudian kesepakatan tersebut ditandatangani dengan perubahan penempatan basis militer di Filipina menjadi 25 tahun. Perjanjian tersebut juga berisi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Filipina pada tanggal 4 Juli 1946 dan pelepasan kedaulatan Amerika Serikat terhadap Filipina.⁹ Republik Filipina menetapkan Manuel L. Quezon sebagai presiden pertama dan Epilio Quirino sebagai wakil Presiden.

⁹ Treaty of General Relations Between the United States of America and the Republic of the Philippines. <https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/b-ph-ust000011-0003.pdf> Signed at Manila, on 4 July 1946

B. Konstitusi Filipina

Konstitusi pada prinsipnya merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma pokok, yang berkaitan dengan kehidupan negara. Konstitusi menjadi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Menurut Carl J. Friedrich dalam buku *Constitutional Government and Democracy*, konstitusionalisme merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.¹⁰

Filipina salah satu negara yang menggunakan konstitusi sebagai dasar menjalankan pemerintahan. Perubahan konstitusi di Filipina terjadi sebanyak empat kali, yaitu konstitusi 1899 (*the Malolos Constitution*), konstitusi 1935, konstitusi 1973, dan konstitusi 1987. Pembentukan konstitusi pertama kali dilakukan pada tahun 1899, di mana konstitusi tersebut dihasilkan dari adanya revolusi yang dilakukan oleh rakyat Filipina untuk melawan bangsa Spanyol, yang kemudian para revolusioner Filipina mendeklarasikan kemerdekaan Filipina di Kawit pada 12 Juni 1898. Konstitusi tersebut dinamakan konstitusi Malolos, telah disetujui pada 20 Januari 1899. Selanjutnya perubahan konstitusi terjadi pada tahun 1935, di mana perubahan terjadi pada sistem pemerintahan yang pada saat itu meniru model pemerintahan demokratis seperti Amerika. Pemilihan Presiden diadakan selama empat tahun sekali dan menggunakan sistem bikameral.

¹⁰ Miriam Budiarjo , *Op.Cit.*, hlm. 171.

Konstitusi 1935 juga tidak bertahan lama, pada tahun 1973 Presiden Ferdinand Marcos mengubah konstitusi 1935, di mana sebelumnya sistem pemerintahan Filipina menggunakan sistem presidensial diubah menjadi sistem parlementer. Perubahan ini dianggap untuk memuluskan pemerintahan otoriter Ferdinand Marcos, dan agar tetap memenangkan kursi kepresidenan. Banyaknya pemberontakan terhadap Presiden Marcos menyebabkan ia digulingkan oleh rakyat Filipina. Pasca turunnya Ferdinand Marcos dari kursi kepresidenan, posisinya digantikan oleh Corazon Aquino, di mana selama masa pemerintahannya, Aquino mengubah konstitusi pada tahun 1987, dan membatalkan beberapa isi konstitusi 1973 yang dianggap menindas rakyat Filipina. Konstitusi 1987 diratifikasi pada tanggal 2 Februari 1987 melalui *plebisit* terdiri dari 18 artikel dan 321 section.¹¹

Presiden ke-11 di Filipina Corazon Aquino membentuk Komisi Konstitusi Filipina untuk menetapkan konstitusi 1987. Penetapan konstitusi dilakukan melalui referendum. Hasil referendum pada tanggal 3 Februari 1987 menunjukkan rakyat Filipina menerima konstitusi baru. Isi konstitusi 1987 diantaranya adalah membentuk perwakilan Filipina yang dibagi menjadi tiga yaitu Eksekutif, Legislatif dengan sistem bikameral, dan Yudikatif. Sistem pemerintahan yang sebelumnya adalah sistem parlementer dikembalikan menjadi sistem presidensial. Pemilihan Presiden dilakukan selama enam tahun sekali. Hingga saat ini konstitusi 1987 masih dipergunakan sebagai hukum tertinggi di Filipina.

¹¹ The Constitution of the Republic of the Philippines. www.gov.ph/constitutions/1987-constitution/ratified-2-February-1987

Berkaitan dengan pemilu Filipina pada tahun 2016, Duterte dianggap telah melanggar konstitusi Filipina dan melanggar hukum internasional. Para pembela HAM melakukan penyelidikan terhadap tindakan Duterte selama menjadi Wali Kota Davao yang dianggap melakukan penindakan diluar hukum terhadap para pelaku kejahatan. Tetapi sejauh ini, tindakan Duterte tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dapat menghentikan langkah Duterte untuk tetap maju dalam pemilihan umum Presiden Filipina pada tahun 2016.

C. Sistem Politik Filipina

1. Partai Politik

Dalam sistem politik di suatu negara partai politik menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Definisi partai politik menurut Carl J. Friedrich adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material.¹² Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.¹³

Sebuah negara demokrasi membutuhkan partai politik untuk menjadi penghubung pemerintah dan rakyat. Partai politik memiliki peran besar sebagai

¹² Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm 404.

¹³ *Ibid.*, hlm 405.

jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, dan pemerintah akan tanggap terhadap aspirasi tersebut.

Partai politik di Filipina memiliki karakteristik bahwa anggota partai politik berasal dari kalangan elit. Hal ini memunculkan adanya kepentingan kelas yang dominan dalam segi sosial dan ekonomi. Adanya dominasi kelas pada partai membuat terbentuknya partai-partai yang *konservatif* dan *paternalistic*. Demi memenuhi kepentingan partai maka partai mengakumulasi sumber-sumber kepentingan. Filipina merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Anggota partai politik dapat berpindah-pindah partai sesuai kepentingannya. Hal ini untuk mendapatkan keuntungan dalam karier politiknya. Filipina dikenal sebagai negara yang memiliki dinasti politik, hal ini salah satunya diakibatkan lemahnya partai politik di negara tersebut. Beberapa partai memilih untuk menggunakan kerabat dekat sebagai pemimpin partai. Hal ini memicu persaingan politik di Filipina hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

2. Gambaran Beberapa Partai di Filipina

Filipina merupakan sebuah negara yang menganut sistem multipartai yang menciptakan banyaknya partai-partai yang bermunculan. Berikut gambaran beberapa partai yang ada di Filipina

a. Laban Ng Demokratikong Pilipino (LDP)

Laban Ng Demokratikong Pilipino (LDP) merupakan Partai Demokrasi Perjuangan Filipina. Partai LDP didirikan pada tahun 1988. Partai ini memilih

untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Asal mulanya dalam pembentukan Lakas ng Bayan (Laban) di tahun 1978 oleh Benigno Aquino Jr, kemudian pada tahun 1983 Laban bergabung dengan Partido Democratico (Partai Demokrasi Filipina) sebagai PDP-Laban oleh Jose Cojuangco, adik dari Corazon Aquino. Partido Democratico digunakan untuk menentang Ferdinand Marcos pada pemilu 1986, Partai ini mengusung Corazon Aquino dan menjadikan Corazon Aquino sebagai Presiden wanita pertama dalam sejarah perpolitikan Filipina. Partai ini mengalami pasang surut dalam partai politik Filipina.

Pada tahun 1994 LDP kembali bangkit kembali sebagai partai alih dengan Fidel Ramos sebagai pemimpinnya. Pada tahun 2016 LDP mendukung Rodrigo Duterte untuk menjadi Presiden Filipina menggantikan Benigno Aquino III.

b. Nacionalista Party (NP)

Partai Nasional merupakan partai tertua di Filipina saat ini. Partai ini didirikan sejak Maret 1907 dan menjadi organisasi politik pertama penyokong kemerdekaan yang diperbolehkan setelah tergulingnya pemerintahan kolonial Amerika tahun 1898.¹⁴ Secara historis partai nasionalis merupakan partai konservatif Filipina. Pada pemilu tahun 1907 partai nasionalis memegang kekuasaan politik Filipina.

Kemenangan partai nasionalis pertama kali mengantarkan Presiden Manuel L. Quezon sebagai Presiden ke-2 Sejak awal kemunculannya partai

¹⁴ Liza Shahnaz, *Strategi G.M Arroyo Memenangkan Pemilihan Presiden Filipina tahun 2004*, Skripsi, UMY, Yogyakarta, hlm. 40.

nasionalis memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara yang damai. Partai nasionalis bersaing dengan ketat dengan partai liberal, beberapa kali pemilu partai nasionalis mengalami kekalahan dari partai liberal. Hingga pemilu tahun 2016, partai nasionalis berhasil memenangkan 6 kali pemilihan umum yaitu pemilu 1935, 1941, 1953, 1957, 1965, dan 1969. Sejak awal berdirinya partai nasionalis memiliki tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Filipina dengan cara-cara yang damai. Hingga sekarang partai nasionalis memiliki tujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan.¹⁵

c. Liberal Party (LP)

Partai liberal merupakan sebuah partai politik pemerintahan dan partai liberal di Filipina didirikan oleh Presiden Senat Manuel Roxas pada tanggal 19 Januari 1946. Pada April 1945 partai liberal berhasil mengantarkan Manuel Roxas sebagai Presiden ke-5 Filipina. Partai ini terus mendapatkan kejayaannya sampai 2 periode berturut-turut pemilihan umum di Filipina. Partai ini kemudian memenangkan pemilu kembali pada tahun 1961 dengan mengantarkan Diosdado Macapagal sebagai Presiden Filipina ke-9. Setelah itu selama 45 tahun partai liberal tidak pernah lagi memegang kekuasaan. Partai liberal kembali memenangkan pemilu Presiden pada tahun 2010 yang menjadikan Benigno Aquino III sebagai seorang Presiden.

¹⁵ About Nacionalista Party. <http://www.nacionalistaparty.com/index.php/about-us> diakses pada 7 Februari 2017

d. Nationalist People's Coalition (NPC)

Partai Koalisi Rakyat Nasionalis adalah sebuah partai politik konservatif Filipina yang didirikan sejak 1992 oleh seorang kandidat Presiden masa itu Eduardo Cojuangco, Jr. partai ini dibentuk setelah beberapa anggota Partai Nacionalista keluar karena berbeda pendapat dengan pemimpin partai Nacionalista dalam mengusung calon untuk pemilu 1992. Pada tahun 1998 partai NPC mendukung Joseph Estrada sebagai calon Presiden dan berhasil memenangkan pemilu. NPC mengalami pasang surut dalam perpolitikan, tetapi hingga tahun 2016 partai ini tetap eksis dan menempatkan beberapa anggotanya dalam lembaga legislatif Filipina.

e. The Partido Demokratiko Pilipino-Lakas Ng Bayan (PDP-Laban)

Partai Demokratik Filipina-Kekuatan Rakyat dikenal sebagai PDP-Laban merupakan salah satu partai politik yang berkuasa di Filipina pada tahun 2016. PDP-Laban merupakan gabungan antara Partido Demokratiko Pilipino dan Lakas ng Bayan. PDP terbentuk pada tahun 1982 oleh Aquilino Pimentel, Jr dan beberapa kelompok yang menolak pemerintahan otoriter Ferdinand Marcos Presiden ke-10 Filipina. Pada tahun 1986 PDP-Laban menjadi partai oposisi terbesar dalam pemilu Presiden Ferdinand Marcos dan mengusung Corazon Aquino sebagai calon Presiden. Setelah ± 30 tahun berlalu, pada tahun 2016 PDP-Laban kembali mengikuti pemilu sebagai partai pengusung untuk calon Presiden Rodrigo Duterte. Dan PDP-Laban berhasil memenangkan pemilu dan menjadikan Rodrigo Duterte sebagai Presiden ke-16 Filipina.

f. National Unity Party (NUP)

Partai Persatuan Nasional adalah partai politik baru di Filipina yang dibentuk pada tahun 2010. Partai ini kemudian mengajukan permohonan akreditasi pada 27 Januari 2011 oleh Komisi Pemilihan. Dan pada tanggal 5 Oktober 2011 partai ini telah resmi sebagai partai politik nasional di Filipina. Partai Persatuan Nasional memiliki slogan “*One Nation, One Future*” untuk menciptakan kesatuan sebagai dasar untuk pembangunan dan perdamaian di Filipina. Dalam pemilihan umum Presiden NUP pertama kali mengikuti pada tahun 2016 dengan mendukung Rodrigo Duterte sebagai calon Presiden yang kemudian berhasil memenangkan pemilu.

3. Parlemen

Filipina adalah sebuah negara yang memiliki sistem parlemen dua kamar (bikameral). Penerapan sistem bikameral di Filipina melalui adanya Senat (majelis tinggi) dan *House of Representative* (majelis rendah). Hal ini juga dinyatakan dalam konstitusi 1987 Filipina.

a. Senat (Majelis Tinggi)

Senat Filipina bertempat di Gedung GSIS, Financial Center di Pasay City. Senat merupakan majelis tinggi dalam badan legislatif di Filipina. Anggota senat berjumlah sebanyak 24 senator yang dipilih melalui pemilihan umum di seluruh negeri. Masa jabatan senator adalah 6 tahun dan senator yang memiliki jabatan sebanyak 2 periode berturut-turut tidak diperbolehkan menjabat kembali

pada periode berikutnya. Senat menjadi satu-satunya badan di Filipina yang dapat menyetujui sebuah perjanjian, dan menjadi penghubung untuk meneruskan kebijakan yang telah ditandatangani oleh senator kepada Presiden.

b. House of Representative (Majelis Rendah)

House of Representative terletak di Batasan Complex, Quezon City. *House of Representative* merupakan majelis rendah dalam parlemen bikameral Filipina berjumlah 295 orang pada tahun 2016. Anggota *House of Representative* memiliki masa jabatan selama 3 tahun, dan maksimal menjabat selama 3 periode (9 tahun). *Congressmen* dipilih melalui distrik dan wakil dari partai (sektoral). Sebanyak 80% perwakilan berasal dari distrik, setiap distrik memberikan wakil 1 orang dan 20% berasal dari partai.

D. Sistem Pemilihan Umum Filipina

Pemilihan umum menjadi salah satu bukti demokrasi pada masa ini. Amerika Serikat menjadi pelopor pembentukan demokrasi di Filipina pada masa penjajahan 1898. Amerika Serikat menjadikan demokrasi Filipina menyerupai demokrasi Amerika. Hal ini dapat dilihat dalam parlemen Amerika dan Filipina memiliki Senat dan *House of Representative*. Kedua negara ini juga melakukan pemilihan Presiden melalui pemilihan umum. Dalam pemilihan Presiden, Filipina menggunakan sistem plural, di mana calon yang memiliki suara terbanyak akan dipastikan memenangkan pemilu. Pemilu Filipina juga tidak hanya memilih Presiden tetapi juga memilih anggota parlemen.

Pemilu menurut Harris G. Warren adalah *Elections are the accostions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. In making decisions, citizens determine what rights they want to have and keep.*¹⁶ Pemilu dijadikan masyarakat sebagai moment untuk memilih pemimpin yang nantinya diharapkan akan membawa perubahan baik kedalam suatu negara. Pemilu juga dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan suatu demokrasi disuatu negara. Rakyat dan pemerintah dijamin demokrasi dapat mengisi satu sama lain untuk menjaga keberlangsungan suatu negara.

Filipina menjadi salah satu negara yang memegang demokrasi dengan kuat. Setiap 6 tahun rakyat memilih Presiden. Pemilihan ini tentunya melalui tahapan-tahapan. Tahapan ini dimulai dengan registrasi pemilih, penetapan jumlah anggota yang akan dipilih untuk tiap daerah pemilihan, kampanye pemilihan, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Pemilu selalu identik dengan diadakannya kampanye oleh para kandidat. Kampanye ini bertujuan untuk menyampaikan visi misi dari para calon agar masyarakat dapat dengan mudah untuk memilih calon mana yang akan memenuhi aspirasi masyarakat dalam pemerintahan. Kampanye dilakukan untuk menggalang dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, hal ini juga menjadi salah satu strategi para calon untuk memenangkan sebuah pemilu.

Pemilu di Filipina dilaksanakan setiap 6 tahun sekali. Pemilu Filipina dilakukan untuk memilih Presiden secara langsung, pemilihan anggota senat, dan

¹⁶ Harris G Warren, dalam Harianto, *Partai Politik Untuk Tujuan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 81.

juga anggota *House of representative* selama 3 tahun sekali. Sebagai negara demokrasi, pemilu Filipina dilakukan oleh rakyat yang telah berusia minimal 18 tahun saat pemilu berlangsung. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan untuk masa jabatan 6 tahun hal ini tertuang dalam konstitusi 1987 dan Presiden hanya diperbolehkan menjabat selama 2 periode.

E. Sistem Pemerintahan Filipina

Konstitusi Filipina 1987 merupakan naskah UUD Filipina yang ke-4, terdiri dari 18 bab dan 321 pasal. Di dalam konstitusi 1987 pasal II ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk pemerintahan Filipina adalah negara demokratis dan republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan kewenangan pemerintah berasal dari rakyat.¹⁷ Sistem pemerintahan Filipina adalah presidensial. Sistem presidensial menunjukkan bahwa kepala negara adalah seorang Presiden dan menjadi badan tertinggi negara. Presiden juga menjadi kepala pemerintahan (eksekutif), Senat dan *House of Representative* (legislatif), Mahkamah Agung (*Supreme of Court*/Yudikatif).

Sistem pemerintahan Filipina menyerupai sistem pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat bahwa Filipina dan Amerika memiliki Senat dan *House of Representative* sebagai lembaga legislatif. Sistem politik dan pemerintahan Fiipina tidak dapat dilepaskan dari Amerika, karena dalam sejarah Amerika memiliki andil dalam pembentukan demokrasi Filipina.

¹⁷ The Philippino People, "Republic Government", <http://www.the-filipino-people.com/Republican-Government.html>, 17 Des 2015.

a. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif Lembaga eksekutif bertugas untuk mengelola dan menyelenggarakan UU yang sesuai dengan batas-batas konstitusional. Lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan dan bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Filipina. Sebagai pemimpin eksekutif, Presiden memiliki tugas untuk mengawasi pemerintahan agar terlaksana dengan baik. Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Filipina, Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang dan melindungi publik dari segala ancaman.

b. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif di Filipina telah terbentuk sejak tahun 1907. Pada tahun 1916 *The Jones Law* menata ulang legislatif dan menjadikan lembaga legislatif menjadi sistem bikameral yang terdiri dari Senat dan *House of representative*. Senat memiliki 24 senator, senator memiliki masa jabatan selama 6 tahun, dan *congressmen* memiliki masa jabatan selama 3 tahun. Lembaga legislatif memiliki tugas untuk merumuskan, memperbaharui dan mencabut kembali UU melalui kekuasaan yang dipegang oleh Kongres Filipina.. Anggota legislatif dapat menolak hak veto Presiden jika disetujui oleh 2/3 anggota.

c. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan badan yang independen, dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. yang terdiri dari hakim ketua dan 14 hakim anggota¹⁸, semuanya ditunjuk oleh Presiden. Usia hakim maksimal 70 tahun. Tugas lembaga yudikatif adalah untuk melakukan peninjauan dan pengujian terhadap deklarasi, perjanjian internasional, hukum, keputusan Presiden agar tidak bertentangan dengan UU dan konstitusi Filipina.

Ketiga lembaga diatas melaksanakan tugas dan kewajibannya secara independen dan tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Ketiga lembaga bekerja sama secara *Check and Balance*.

Selain ketiga lembaga diatas, konstitusi 1987 juga menetapkan tiga komisi konstitusi yang independen. Pertama, Komisi Pelayanan Sipil yang bertindak sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab dalam hal personil pemerintah. Kedua, Komisi pemilihan Umum yang mengelola semua hukum dan peraturan dalam pemilu untuk memastikan kebebasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiga, Komisi Audit yang memeriksa transparansi dana, transaksi, dan rekening milik pemerintah dan lembaga-lembaganya. Semua keputusan dari lembaga tersebut akan ditinjau oleh

¹⁸ Constitution Net, "Constitution history of the Philippines", <http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-philippines>, 17 Des 2015.

Mahkamah Agung. Masing-masing lembaga independen diciptakan untuk tujuan mempromosikan perilaku moral dan etika dalam pemerintahan.¹⁹

F. Penolakan Terhadap Duterte

Sejak awal kemunculannya sebagai kandidat Presiden Filipina, banyak pihak yang mencari informasi mengenai bagaimana sosok Duterte. Duterte dikenal sebagai Wali Kota yang kontroversial di kota Davao. Bagi masyarakat Davao, Duterte bukanlah sosok baru, ia dianggap sebagai sosok yang berhasil mengubah Davao menjadi kota yang lebih baik dan menjadikan kota Davao menjadi kota yang aman dan nyaman. Dalam menjalankan pemerintahannya di kota Davao, Duterte selalu tegas bahkan dianggap sebagai pemimpin yang keras. Ia tidak pernah pandang bulu terhadap pelaku kejahatan. Bagi Duterte pelaku kejahatan merupakan musuh yang harus diberantas. Pernyataan-pernyataan Duterte yang kontroversial juga membuat Duterte banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak dari dalam negeri bahkan luar negeri.

Pernyataan Duterte yang dikenal kontroversial dan mendapat kecaman keras dari banyak pihak adalah ketika Duterte dianggap melakukan pelecehan melalui leluconnya terhadap seorang misionaris wanita asal Australia yang tewas dibunuh dan diperkosa di penjara Davao pada tahun 1989, di mana ia menyatakan leluconnya tersebut sewaktu kampanye dihadapan masyarakat. Duterte menyatakan *“I saw her face and I thought, What a pity... they raped her, they all lined up. I was mad she was raped but she was so beautiful. I thought, the mayor*

¹⁹ *Ibid.*

should have been first". Atas pernyataan tersebut, Duterte mendapat kritikan dan kecaman dari duta besar Australia untuk Filipina Amanda Gorely, Amanda Gorely menyampaikan kritiknya tersebut melalui akun twitter pribadinya, ia menyatakan bahwa "Pemeriksaan dan pembunuhan tidak seharusnya dijadikan bahan lelucon. Kekerasan terhadap wanita dan perempuan merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima di mana pun". Selain Australia, Amerika Serikat juga ikut menyampaikan kritiknya terhadap lelucon Duterte tersebut, melalui duta besar AS untuk Filipina Philip Goldberg, Goldberg mengungkapkan "Pernyataan siapapun, entah itu melecehkan wanita atau membuat lelucon atas pemeriksaan atau pembunuhan, bukan sesuatu yang dapat kami terima".²⁰

Adanya kritikan dari Australia dan Amerika Serikat ternyata tidak mempengaruhi Duterte untuk menjalankan aksi kampanyenya. Ia bahkan menyatakan bahwa jika ia terpilih menjadi Presiden Filipina maka ia akan memutuskan hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut. Duterte juga menyatakan kepada Australia "*Stay out, Australian government, stay out*".²¹ Hal itu ia nyatakan untuk membalas kritikan duta besar Australia untuk Filipina.

Selain kritikan terhadap ucapan kontroversialnya. Duterte juga mendapat penolakan-penolakan yang muncul dari berbagai kalangan untuk menyuarakan

²⁰ Capres Filipina Ancam Putus Hubungan dengan AS dan Australia. <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/04/21/517324/capres-filipina-ancam-putus-hubungan-dengan-as-dan-australia> diakses 21 April 2016

²¹ Rodrigo Duterte: 'Stay out' of campaign Australia, says presidential candidate who joked of rape. <http://www.abc.net.au/news/2016-04-20/philippines-presidential-candidate-who-joked-of-rape/7340832> diakses pada 20 April 2016

agar masyarakat tidak memilih Duterte sebagai Presiden baru Filipina. Salah satu penolakan yang datang kepada Duterte adalah dari Presiden ke-15 Filipina Benigno Aquino III, Benigno dalam kampanyenya menyatakan bahwa Duterte adalah sebuah ancaman bagi keberlangsungan demokrasi Filipina. Benigno menyerukan bahwa Duterte akan menjadi pemimpin yang otoriter dan diktator. Benigno juga menyatakan bahwa Filipina akan kembali kepada jaman darurat militer Ferdinand Marcos seorang Presiden Filipina yang ke-10 di mana Marcos berhasil digulingkan oleh rakyat Filipina karena memonopoli pengambilan keputusan di Filipina.

Penolakan lain yang datang kepada Duterte adalah dari para aktivis HAM. Cara Duterte memberantas kejahatan membuat aktivis HAM mengecam Duterte. Duterte dianggap mengabaikan Hak Asasi Manusia, berdasarkan data yang dimiliki Komisi HAM telah ada lebih dari 1000 orang telah tewas akibat eksekusi yang dilakukan selama Duterte menjadi Wali Kota. Aktivis HAM menyatakan bahwa ini adalah ancaman besar bagi Filipina jika Duterte terpilih menjadi Presiden karena angka kematian di Filipina akan terus meningkat, mengingat di dalam setiap kampanyenya Duterte telah menyuarakan bahwa ia akan menghabisi siapa saja yang melakukan kejahatan.